

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada akhir – akhir ini muncul sebuah realitas baru yang tidak mengembirakan bagi kaum perempuan. Dari data yang didapatkan selama tahun 2010, di Propinsi Jawa Timur tercatat sudah ada 1.181 orang kekerasan dengan jumlah 709 kasus. Dikatakan kasus tertinggi karena pemerkosaan yang mencapai 33%, kekerasan terhadap anak sebanyak 17%, sisanya kekerasan terhadap istri. Ironisnya, bukan hanya perempuan yang suah berkeluarga saja yang rawan menjadi korban, tetapi juga remaja yang memiliki pacar juga banyak yang bernasib serupa.<sup>1</sup>

Lebih khusus, di Surabaya yang dinobatkan sebagai Kota Peduli Perempuan, jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di kota ini masih tinggi. Dari data Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT P2A) Surabaya mencatat, tahun 2011 ada sebanyak 60 perempuan menjadi korban KDRT. Sedang korban KDRT terhadap anak mencapai 22 kasus. Jumlah tersebut paling banyak perempuan yang mengalami kekerasan psikis sebanyak 30 kasus, disusul penelantaran ekonomi sebanyak 16 kasus, 12 kasus mengalami kekerasan fisik dan sisanya kekerasan seks.<sup>2</sup> Sedangkan pada tahun 2010 yang

---

<sup>1</sup> Renni Susilawati, *Bahkan Perempuan Kerap Dikasari Pacarnya*, ([http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum & Kriminal/2011-11-27/119036/Bahkan, Perempuan Kerap Dikasari Pacarnya](http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum%20&%20Kriminal/2011-11-27/119036/Bahkan,PerempuanKerapDikasariPacarnya). Diakses Jum'at 18 Mei 2012)

<sup>2</sup> Zainal Effendi, *75 Persen Perempuan di Surabaya Menjadi Korban KDRT*, (<http://surabaya.detik.com/read/2012/01/28/112707/1827791/466/75-persen-perempuan-di-surabaya-menjadi-korban-kdrt>, diakses Jum'at 18 Mei 2012)

lalu tercatat anak – anak perempuan yang dijual sebagai pekerja seks komersial di wilayah Asia mencapai 840.000 jiwa.<sup>3</sup>

Namun demikian, hal itu merupakan fenomena gunung es, yakni angka yang muncul dipermukaan hanyalah merupakan sebagian kecil, karena yang ada dibawah permukaan jumlahnya jauh lebih banyak daripada itu. Itu disebabkan karena sedikitnya korban yang melaporkan, terutama kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk di Jawa Timur dianggap tabu, dan dikategorikan sebagai “membuka aibnya sendiri”.

Di Surabaya, tingkat perceraian selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup mencengangkan. Pada tahun 2008 tercatat 1777 pasangan bercerai, setahun berikutnya tercatat sebanyak 2041 pasangan bercerai, sedang pada tahun 2010 sebanyak 2430 pasangan bercerai. Perceraian ini disebabkan beberapa faktor, antara lain faktor himpitan ekonomi, suami tak bertanggung jawab dan karena aniaya.<sup>4</sup>

Pada masyarakat yang menganut sistem patriarkhi, ada relasi gender yang timpang antara laki – laki dengan perempuan dan anak dihadapan orang dewasa. Dapat dipastikan terjadi banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dimana hal itu mendapat legitimasi atau pengesahan dari nilai budaya dan tafsir ajaran agama serta hukum negara. Mereka harus tunduk dan patuh kepada suami, ayah, kakek, kakak laki – laki. Oleh karena itu kejahatan ini disebut juga sebagai “*gender-based-violence*”. Kaum perempuan bisa dikatakan sebagai makhluk yang

---

<sup>3</sup> Mufidah, *Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafficking dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), hlm. 4

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, *Surabaya dalam Angka 2011*

rentan terhadap segala jenis kekerasan karena posisinya yang lemah atau sengaja dilemahkan, baik secara sosial, ekonomi, politik maupun secara budaya.<sup>5</sup>

Sementara sistem nilai universal dalam hukum adalah : keadilan kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Akan tetapi hukum yang berlaku masih produk pemerintah kolonial Belanda yang saat itu juga menganut nilai patriarkhis.

Secara normatif, kedudukan wanita dan pria adalah sejajar. Akan tetapi, dalam kehidupan nyata seringkali terdapat apa yang sering disebut dengan istilah *gender stratification* yang menempatkan wanita dalam tatanan hierarkhis pada posisi subordinan atau tidak persis sejajar dengan posisi kaum pria.<sup>6</sup> Tatanan hierarkhis demikian antara lain ditandai oleh kesenjangan ekonomi (perbedaan akses pada sumber – sumber ekonomi) dan sekaligus kesejangan politik (perbedaan akses peran politik). Dibandingkan dengan wanita, pria memperoleh akses yang lebih besar kepada sumber – sumber ekonomi dan politik.

Secara ekonomis, pria lebih banyak mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan dari pada wanita. Sedangkan secara politis, pria lebih banyak menempati posisi – posisi kunci dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perjuangan wanita untuk mencapai puncak strata sosial lebih berat dan berliku – liku. Tentu saja, kecenderungan semacam itu tidak melekat di setiap masyarakat. Namun, bahwa kecenderungan itu terjadi di sebagian besar negara berkembang, sudah ditunjukkan oleh banyak studi.

---

<sup>5</sup> Happy Budi Febriasih, *Gender dan Demokrasi*, (Malang : Averroes Press. 2008), hlm. 65

<sup>6</sup> Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010), hlm. 114

Proses tranformasi ekonomi antara pria dan wanita dapat dibagi ke dalam tiga katagori periode perkembangan :<sup>7</sup>

1. Periode Ekonomi Berbasis Keluarga (*The Family Based – Economy*)

Pada Periode ini, rumah tangga masih menjadi basis dari kegiatan ekonomi. Kegiatan Produksi banyak dilakukan di dalam rumah. Itulah sebabnya pada saat itu hampir tidak ada perbedaan yang jelas antara kegiatan ekonomi dan kehidupan domestic. Kerja dalam periode ini dikonsepsikan sebagai aktivitas produktivitas bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Semua anggota keluarga (termasuk anak – anak) adalah tenaga kerja yang mempunyai kontribusi berarti dalam proses produksi. Perempuan (ibu rumah tangga) harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang ada di dalam rumah. Dengan demikian, perempuan mempunyai peran penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.

Pada periode ini pula, perempuan sebenarnya tidak hanya bekerja dalam urusan rumah tangga, melainkan juga terlibat dalam kegiatan di luar rumah, terutama di bidang pertanian. Bahkan di beberapa tempat dimana kota sudah mulai berkembang, perempuan berpartisipasi pula dalam kegiatan jasa dan perdagangan seperti penjaga toko, pengrajin atau membuka warung – warung makanan. Meskipun demikian, kegiatan yang mereka lakukan tidak berdiri sendiri, tetapi tetap memiliki interdependensi dengan pria. Kegiatan ekonomi perempuan dan pria memang agak berbeda, namun tetap ada semacam ketergantungan satu sama lain. Mereka hampir tidak mungkin dipisahkan,

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 115

terutama karena kelangsungan kegiatan ekonomi perempuan ditentukan oleh kegiatan ekonomi pria, dan demikian pula sebaliknya. Karena itu, tidak terlalu berlebihan bila dikatakan bahwa status dan peran yang dimiliki oleh perempuan lebih kurang sejajar dengan status dan peran yang dimiliki oleh pria.

2. Periode Ekonomi Keluarga Berdasarkan Upah (*The Family-Wage Economy*)

Periode ini ditandai dengan transformasi kegiatan ekonomi dari pertanian ke perdagangan, sejajar dengan perkembangan kapitalisme. Pada periode ini, tenaga kerja tidak lagi terkonsentrasi pada kegiatan rumah tangga, tetapi di luar rumah terutama di pabrik – pabrik yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan proses industrialisasi dan perkembangan teknologi. Karena itu, kebutuhan rumah tangga dipenuhi dengan upah yang diperoleh dari luar rumah. Pergeseran tenaga kerja dan produksi komoditi semacam itu berpengaruh terhadap karakter pekerjaan perempuan. Di kalangan perempuan terbentuk apa yang lazim di sebut *the development of dual roles* atau peran ganda. Di satu pihak sebagai tenaga kerja yang memperoleh upah, di lain pihak sebagai ibu rumah tangga.

Pada periode ini, rumah tangga tidak lagi menjadi pusat kegiatan produksi, meskipun pekerjaan perempuan di rumah secara ekonomis tetap diperlukan. Oleh karena fokus kerja berada di luar rumah, nilai kerja seseorang lebih diukur dari penghasilan yang diperolehnya. Pekerjaan di luar rumah yang dianggap dapat mendatangkan upah yang lebih tinggi, menjadi bernilai tinggi. Sedangkan pekerjaan perempuan di dalam rumah tangga

kurang dihargai karena tidak mendatangkan uang. Nilai pekerjaan yang semacam itu dianggap rendah (*devaluated*). Tidak mengherankan apabila status dan peran perempuan menjadi kurang sejajar dengan pria.

Di dalam situasi ekonomi yang mengembangkan sistem upah, proses produksi dan distribusi barang lebih banyak yang membutuhkan uang tunai. Situasi yang seperti ini semakin memojokkan posisi perempuan. Karena meskipun perempuan bekerja di pabrik dengan sistem upah, mereka hanya menerima upah yang lebih rendah daripada pria. Bahkan sebagian dari mereka diterima bekerja di pabrik karena pertimbangan dapat diupah dengan jumlah yang lebih rendah. Sebaliknya, pria justru mendapatkan upah yang lebih tinggi, dan oleh karenanya memperoleh penghargaan yang lebih tinggi pula. Pria berada pada posisi yang lebih diuntungkan dalam sistem kerja upah tersebut. Karena uang tunai sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi, maka mudah dimengerti apabila wanita secara finansial semakin tergantung kepada pria.

### 3. Periode Konsumtif (*The Family – Consumer Economy*)

Periode ini ditandai oleh kehadiran negara (campur tangan pemerintah) dalam sistem upah tenaga kerja. Dalam periode ini, terjadi perubahan teknologi yang cukup pesat dan peningkatan produktivitas, yang dalam perkembangannya membuat anggota rumah tangga lebih banyak melakukan fungsi konsumsi dan reproduksi. Meskipun pada periode ini, produksi berada di luar rumah, tenaga kerja dari anggota keluarga mempunyai kontribusi yang sangat berarti bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Hal ini

terjadi karena perempuan berfungsi ganda. Dalam kondisi demikian, produktivitas perempuan bahkan dapat lebih tinggi daripada periode sebelumnya.

Sebagian besar hasil “cucuran keringat” mereka tidak mendatangkan uang tunai, dan konsekuensinya mereka tidak begitu diperhitungkan. Institusi – institusi publik, seperti sekolah, sistem asuransi dan industri makanan (terutama *fast food*) telah menggantikan berbagai macam aktivitas sebelumnya dikerjakan di dalam rumah. Itulah sebabnya perempuan hanya dianggap sebagai penerima (*consumer*), meskipun dalam beberapa kasus juga ditemukan bahwa penghasilan yang mereka peroleh masih diperlukan dalam memberi dukungan pada pemenuhan kebutuhan keluarga.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa industrialisasi telah mengubah pola atau pengaturan kesempatan kerja. Perkembangan industri yang melaju dengan pesat, di samping menciptakan kelas pekerja (*working class*) dalam jumlah yang sangat besar, juga menciptakan banyak kelas menengah (*middle class*). Ketika produksi dan dunia perdagangan maju dengan pesat, manajemen juga berkembang semakin kompleks, antara lain ditandai dengan meningkatnya pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi dan akuntansi. Meskipun demikian, kesempatan kerja bagi perempuan untuk bekerja di bidang itu seringkali hanya terbatas pada pekerjaan sekretaris atau tata usaha.

Penempatan perempuan pada jenis pekerjaan ini terutama dilandasi ideologi bahwa mereka lebih trampil dalam mengerjakannya daripada pria. Perempuan sebenarnya juga terserap ke dalam pekerjaan di luar sektor industri, tetapi sekali

lagi mereka lebih banyak ditempatkan pada bidang – bidang yang dianggap membutuhkan ketelatenan atau kesabaran, seperti perawat dan pendidikan untuk anak – anak. Mereka dianggap lebih sesuai untuk melakukan pekerjaan semacam itu daripada pria.

Sedangkan dalam bidang politik, apabila disimak pada perjalanan politik Indonesia dalam seperempat abad terakhir sebenarnya sudah melibatkan kaum perempuan. Pada kepengurusan teras partai politik, ada nama Megawati Soekarnoputri. Namun persoalannya adalah tidak banyak perempuan yang menempati posisi – posisi kunci, baik dalam organisasi politik, badan legislatif maupun birokrasi pemerintahan.

Dalam kehidupan masyarakat kita, perjanjian sosial yang mengatur peranan tersebut masih dibingkai oleh sebuah sistem yang lazim disebut *patriarchal*, yaitu suatu mekanisme yang lebih banyak menempatkan kaum pria pada posisi kunci atau pada peranan yang lebih dominant. Sistem tersebut terutama menempatkan status dan peranan perempuan di bawah perwalian suaminya, seorang anak perempuan di bawah perwalian ayahnya atau saudara laki – lakinya.

Konsekuensinya adalah semakin terbatasnya kesempatan dan akses perempuan dalam urusan – urusan yang berkaitan dengan aktivitas publik (*public activity*). Kalaupun perempuan terlibat dalam aktivitas publik, pada umumnya mereka hanya menempati bidang – bidang yang bersentuhan langsung dengan kepentingan domestik (rumah tangga). Sebaliknya, kaum pria lebih leluasa, kesempatannya lebih longgar dan aksesnya pun lebih besar. Itulah sebabnya dalam percaturan politik, perempuan berada di wilayah pinggiran. Jalan mereka



untuk menjadi bagian dari kelompok elit politik sangat terjal, dan penuh dengan rintangan kultural.

Zaman sudah berubah, segala hal yang terkait dengan ketidakadilan gender membuat banyak pihak merasa dirugikan. Dan ketidakadilan tersebut dapat diartikan juga merupakan suatu kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itulah di Surabaya terdapat cukup banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dibentuk untuk menaungi aspirasi masyarakat untuk mencari solusi bersama mereka. LSM Samitra Abhaya Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) adalah satu dari sekian banyak LSM yang ada di kota pahlawan untuk menampung bahkan membela kepentingan perempuan.

Dari berbagai program yang dilaksanakan oleh LSM ini, ada satu program yang terkait dengan ketimpangan gender di Surabaya, yakni pembentukan Kelompok Ibu Mandiri (KIM). Mereka, Memfasilitasi terbentuknya sistem penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat komunitas. Dengan cara penyadaran dan pelatihan serta diskusi – diskusi dan pertemuan warga, bertukar pengalaman antar komunitas dan sebagainya.

LSM ini juga melakukan pengorganisasian masyarakat, khususnya perempuan miskin kota dalam memperjuangkan hak politik dan hak warga negaranya. Ada empat komunitas di Surabaya yang bekerja sama dengan lembaga ini. Hingga kini, LSM Samitra Abhaya KPPD telah bekerja sama dengan empat komunitas di Surabaya. Di antaranya adalah masyarakat di Kedung Cowek, Nambangan dan Cumpat (kampung nelayan) di Surabaya Selatan, dan Kampung Baru

(perkampungan yang berada di sepanjang bantaran sungai, yang dari tahun ke tahun tergusur).

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam pembahasan skripsi, yakni :

1. Bagaimanakah pola pendampingan LSM Samitra Abhaya KPPD dalam pemberdayaan perempuan di Surabaya?
2. Apa perubahan yang terjadi kepada para perempuan setelah diberdayakan oleh LSM Samitra Abhaya KPPD?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimanakah pola pendampingan LSM Samitra Abhaya KPPD dalam pemberdayaan perempuan di Surabaya.
2. Mengetahui perubahan apa yang terjadi kepada para perempuan setelah diberdayakan oleh LSM Samitra Abhaya KPPD.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi :

1. Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti mengenai materi yang dibahas maupun metode yang digunakan dalam meneliti. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pengalaman secara teori maupun praktek lapangan bagi peneliti dalam hal strategi pemberdayaan perempuan di Surabaya.

## 2. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dengan adanya penelitian ini, diinginkan agar dapat menambah referensi bahan bacaan yang inspiratif dan mampu meningkatkan keilmuan tentang strategi pemberdayaan yang pro terhadap perempuan, bagi pembaca di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam khususnya, dan Fakultas Dakwah pada umumnya.

## 3. Universitas

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi para peneliti, selanjutnya dengan tujuan agar keilmuan tentang strategi pemberdayaan perempuan dapat bertambah dan bisa sebagai bahan referensi dan sumber inspirasi. Juga tak kalah pentingnya, hasil penelitian ini juga sebagai perbendaharaan perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk kepentingan ilmiah selanjutnya.

## 4. Masyarakat

Masyarakat dapat terinspirasi dan menyadari betapa pentingnya strategi yang melindungi kaum perempuan dan anak yang notabene sering mendapatkan perlakuan yang menjurus kepada kekerasan, baik secara fisik maupun mental.

### **E. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebagai pertimbangan bagi penelitian ini, peneliti mencari hasil referensi hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan pada fokus penelitian yang ingin diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai rujukan adalah :

Skripsi dari Imroatus Istiadah, dengan judul “Perlindungan Anak dan Keluarga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) di Kabupaten Sidoarjo”.

Penelitian ini mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta segala bentuknya. Lalu, sebagai penyelesaian masalah, lembaga ini menggunakan konseling atau pendidikan terhadap keluarga agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangganya.

Penelitian yang akan dilakukan juga terkait tentang perempuan dan anak, namun tidak berfokus terhadap konseling, melainkan pada bagaimana pola pendampingan dan pengorganisasian yang dilakukan oleh LSM KPPD Samitra Abhaya dalam memberdayakan perempuan di Kampung Nelayan Nambangan dan Cumpat, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Surabaya.

#### **F. Definisi Operasional**

Di dalam suatu penelitian, dibutuhkan uraian arti tiap – tiap konsep yang ada. Agar penelitian tersebut mempunyai batasan yang jelas. Definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel.

Definisi operasional dari variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Pemberdayaan Perempuan* adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok perempuan yang dianggap lemah dalam

masyarakat, termasuk individu – individu yang mengalami masalah kekerasan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

2. *Pengembangan Masyarakat* adalah suatu proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya – upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Pengembangan masyarakat sesungguhnya merupakan sebuah proses kolektif di mana kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bernegara tidak sekedar menyiapkan penyesuaian – penyesuaian terhadap perubahan sosial yang mereka lalui, tetapi secara aktif mengarahkan perubahan tersebut pada terpenuhinya kebutuhan bersama.<sup>9</sup>

### 3. *Kekerasan Terhadap Perempuan*

Ada beberapa definisi mengenai arti kekerasan terhadap perempuan. Pertama, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual termasuk di dalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang – wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga maupun bernegara.

Kedua, adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk di dalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan

---

<sup>8</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : P.T. Refika Aditama, 2005), hlm. 57

<sup>9</sup> Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 6

kemerdekaan secara sewenang – wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi (Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan).

Ketiga, kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, di mana pelakunya harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat. Keempat, kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Kekerasan ini biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain.

#### 4. *Kekerasan Berbasis Gender*

Adalah sebuah bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang secara serius menghalangi kesempatan wanita untuk menikmati hak – hak kebebasannya atas dasar persamaan laki – laki. Kekerasan berbasis gender juga dapat diartikan yaitu suatu kekerasan yang langsung ditujukan kepada seorang perempuan karena dia adalah perempuan atau hal – hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proposional. Hal tersebut termasuk tindakan – tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman – ancaman seperti paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.

5. *Lembaga Swadaya Masyarakat Samitra Abhaya – Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (LSM SA-KPPD)* adalah lembaga yang mengupayakan perlindungan terhadap perempuan, memperjuangkan hak – hak perempuan, khususnya hak

bebas dari segala bentuk diskriminasi sebagai bagian dari hak asasi manusia demi mewujudkan masyarakat sipil yang kuat adil dan demokratis.

Jadi, yang dimaksud dari judul “**Strategi LSM Samitra Abhaya KPPD dalam Pemberdayaan Perempuan di Surabaya**” adalah suatu cara atau tindakan yang dilakukan oleh LSM Samitra Abhaya KPPD dalam melakukan upaya – upaya perbaikan kualitas pada perempuan, agar perempuan dapat aktif dan mandiri dalam kehidupannya serta terhindar dari segala diskriminasi sosial.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari VI Bab, yang dapat diperinci sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan. Pada bab ini disajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi konsep dan kemudian ditutup dengan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Pembahasan. Bab ini berisi tentang konsep pemberdayaan menurut buku dan konsep pemberdayaan menurut LSM Samitra Abhaya KPPD di Surabaya.

**BAB III** : Metode Penelitian. Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, tahap – tahap penelitian, tahap pengumpulan data, dan teknis analisis data.

**BAB IV** : Deskripsi Lokasi Penelitian. Berisi tentang uraian deskripsi LSM Samitra Abhaya KPPD, latar belakang berdiri, maksud dan tujuan, sasaran, visi, dan misi, struktur organisasi. Serta jumlah kasus yang ditangani dan program kerja lembaga.

**BAB V** : Penyajian dan Analisis Data. Pada bab ini, dipaparkan temuan – temuan lapangan dalam pemberdayaan perempuan oleh LSM Samitra Abhaya KPPD, melalui pembentukan Kelompok Ibu Mandiri, serta perubahan apa yang terjadi di masyarakat setelah diberdayakan.

**BAB VI** : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan sasaran dari penelitian adalah bab yang meliputi upaya pemberdayaan perempuan di Surabaya.